



KOLABORASI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA- PERANCIS; STRATEGI MENGURANGI KETEGANGAN DI KAWASAN INDO-PASIFIK

**Indonesia-France Defense Diplomacy Collaboration;
Strategies for Reducing Tensions in The Indo-Pacific Region**

Destianto Nugroho Utomo, Judy Sudrajat, Mhd Halkis

Program Studi Strategi Dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
halkis@esaunggul.ac.id

***Abstract.** It has been more than a decade since an intense research interest in regional power emerged in international relations. After the cold war, the urge to build regional power increased. This study aims to explain the Indonesia-France defense diplomatic collaboration in reducing tensions between the United States allies and the rise of China in the Indo-Pacific region. The researcher uses a qualitative method with an analytical descriptive research design. The researcher realizes that the international climate for alliance countries with non-aligned countries is quite profitable. The researcher describes the concept of defense diplomacy as part of a military campaign from three different perspectives. First, the strength of the strategic environment of the US alliance and the rise of China's power in the Indo-Pacific region. Second, ASEAN's regional strategic strength in facing global forces. Third, French-Indonesian Defense Diplomacy in building the Indo-Pacific regional order. The researcher concludes that the power of Comparative Regionalism contains several approaches that can reduce tensions between major powers, especially America's allies and China in the Indo-Pacific region.*

Keywords; defense diplomacy, comparative regionalism, strategic partners, military campaigns, defense cooperation

ABSTRAK. Sudah lebih dari satu dekade sejak minat penelitian yang intens terhadap kekuatan regional muncul dalam hubungan internasional. Pasca perang dingin, desakan untuk membangun kekuatan regional semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi diplomasi pertahanan Indonesia-Perancis dalam meredakan ketegangan antara sekutu Amerika Serikat dan kebangkitan China di kawasan Indo-Pasifik. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Peneliti menyadari bahwa iklim internasional bagi negara-negara aliansi dengan negara-negara nonblok cukup menguntungkan. Peneliti menjelaskan konsep diplomasi pertahanan sebagai bagian dari kampanye militer dari tiga perspektif yang berbeda. Pertama, kekuatan lingkungan strategis aliansi AS dan kebangkitan kekuatan China di kawasan Indo Pasifik. Kedua, kekuatan strategis regional ASEAN dalam menghadapi kekuatan global. Ketiga Diplomasi Pertahanan Indonesia-Perancis dalam membangun tatanan kawasan Indo Pasifik.



Peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan *Comparative Regionalism* mengandung beberapa pendekatan yang dapat meredakan ketegangan antara kekuatan besar, khususnya sekutu Amerika dengan China di kawasan Indo Pasifik.

Kata kunci; diplomasi pertahanan, regionalisme komparatif, mitra strategis, kampanye militer, kerjasama pertahanan

1. Pendahuluan

Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis, Sébastien Lecornu, ke Jakarta, Indonesia pada November 2022 mengisyaratkan bahwa Perancis ingin memperkuat kerja sama strategisnya dengan Indonesia dan Asosiasi Negara Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengurangi resiko eskalasi di Indo-Pasifik. Kunjungan tersebut berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 25 dan 26 November 2022.

Untuk menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia, Perancis harus menemukan cara yang sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia, terutama bahwa Indonesia merupakan negara non-blok yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Penjualan pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut VIP Falcon 7X dan 8X buatan Perancis ke Indonesia merupakan salah satu bukti menguatnya kerja sama pertahanan kedua negara. Pada 30 Oktober 2021 di Roma, dalam pertemuan G20, Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pembicaraan pada pertemuan tersebut berfokus pada situasi di zona Indo-Pasifik, bagian dari persaingan antara China dan Amerika Serikat, di mana Perancis berupaya memperkuat pengaruhnya. Pada KTT G-20 di Bali tanggal 16 November 2022, saat Indonesia menjalankan Presidensi G-20, Presiden RI Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut kedua negara kembali menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama agar G-20 dapat memberikan manfaat bagi dunia. Selain membahas transisi energi, kedua pemimpin tersebut juga membahas kerja sama pertahanan dan kedirgantaraan. Presiden RI mengharapkan bahwa kerjasama pertahanan kedua negara tidak terbatas pada pengadaan alat utama sistem



persenjataan (alutsista) semata, tetapi juga mencakup produksi bersama, alih teknologi, dan investasi manufaktur.

Perancis selain anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga negara dengan wilayah daratan utama di benua Eropa, juga memiliki komunitas teritorial di Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, dan Wallis dan Futuna, serta Clipperton, pulau tak berpenghuni seluas 1,7 km² yang terletak lebih dari 1.000 kilometer dari pantai Meksiko, Perancis merupakan "kekuatan Pasifik". Hal ini juga mendorong Perancis menjadi salah satu anggota Komunitas Pasifik, sebuah organisasi internasional untuk kerjasama ilmiah dan teknis yang juga mencakup 22 negara bagian dan teritori kepulauan Pasifik serta Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang kantor pusatnya berada di Noumea, Kaledonia Baru. Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke India tahun 2018 menyatakan bahwa Perancis ingin menjadikan India sebagai mitra strategis pertama di kawasan. Dua bulan kemudian, dalam pidatonya di pangkalan Angkatan Laut Garden Island di Sydney, Australia, Presiden Perancis secara terbuka mengadopsi istilah "Indo-Pasifik". Perancis telah menyatakan keinginannya untuk menciptakan "poros strategis Paris-New Delhi-Canberra untuk menghadapi tantangan zona Indo-Pasifik, khususnya keinginan untuk proyeksi China, terorisme, dan perubahan iklim".

Presiden Perancis Emmanuel Macron menggambarkan perjanjian yang ditandatangani dua tahun sebelumnya untuk penjualan 12 kapal selam ke Australia sebagai "langkah pertama dalam memperdalam kerja sama di semua bidang industri pertahanan, hubungan antar staf dan penyelarasan strategis kedua negara". Pada perkembangannya tanggal 15 September 2021, Australia memutuskan kontrak dan mengumumkan pembentukan AUKUS, aliansi militer antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Dalam konteks yang digambarkan oleh jurnalis dan ahli geopolitik Perancis Renaud Girard sebagai "tampan Anglo-Saxon". Tidak lama setelah pengumuman pembentukan AUKUS tersebut, Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo.

Dalam wawancara Mercy A. Kuo dari majalah *The Diplomat*, Gurpreet S. Khurana, dengan direktur eksekutif Yayasan Maritim Nasional India, menjelaskan bahwa inisiatif

China, khususnya di Samudera Hindia, membawa India dan Jepang untuk bekerja sama dalam analisis strategis. Pada tahun 2007, dalam pidatonya di hadapan parlemen India, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe adalah orang pertama yang menggunakan istilah "Indo-Pasifik" dalam konteks ini.

Istilah "Indo-Pasifik" juga sudah lama digunakan, terutama selama masa Perang Dunia II, Sekutu melawan Jepang, yaitu Amerika, Australia, dan Inggris - dengan Jepang menduduki Hindia Belanda dan IndoChina Perancis - mengakui karakter "Indo-Pasifik" dari wilayah konflik, yang membentang di Samudera Hindia dan Pasifik. Inggris telah menggunakan istilah ini hingga tahun 1960-an.



Wilayah Indo-Pasifik/gasam.org.tr

Gambar 1.1. Peta kawasan Indo Pasifik

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat menduduki Jepang serta bagian selatan Korea, dijajah oleh Tokyo pada tahun 1910, setengah lainnya diduduki oleh Uni Soviet. Pendudukan Korea Selatan berakhir pada tahun 1948. Pada tahun 1949, Komunis Tiongkok, yang dipimpin oleh Mao Zedong, mengalahkan tentara Republik Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek dan memaksanya berlindung di pulau Taiwan bersama anak buahnya. Pada tahun 1950, tentara Korea Utara, didukung oleh ratusan ribu "sukarelawan" Tiongkok, menyerbu Korea Selatan. Amerika Serikat melakukan campur tangan secara militer di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perang Korea berakhir dengan



gencatan senjata. Pasukan Amerika Serikat memiliki pangkalan di Korea Selatan, di mana mereka memiliki pangkalan udara dan angkatan laut.

Pada bulan Januari 2021, Menteri Angkatan Bersenjata, Florence Parly, bertemu Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, membahas penguatan kerja sama militer antara Perancis dan Indonesia, sejalan dengan kemitraan strategis yang telah terjalin antara kedua negara pada tahun 2011. "Sebagai dua mitra strategis, Indonesia dan Perancis memiliki kerja sama pertahanan yang baik. Indonesia ingin terus memperkuat kerja sama pertahanan, terutama di bidang yang dapat meningkatkan alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan Indonesia," demikian keterangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sesuai wawancara dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly, di Paris. Secara rinci, hal tersebut merupakan komitmen nyata penguatan kerjasama Perancis-Indonesia di bidang pelatihan, intelijen, kontra-terorisme, operasi pemeliharaan perdamaian, misi kemanusiaan, dan pengembangan industri pertahanan. Diskusi terkait pembahasan perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara atau DCA (*Defence Cooperation Agreement*) telah berlangsung sepanjang tahun 2020. Hal ini seiring dengan negosiasi terkait kemungkinan pembelian setidaknya 36 pesawat Rafale oleh Pemerintah RI. Pada Desember 2020, Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly menyatakan bahwa negosiasi mengenai kemungkinan kontrak baru untuk pesawat tempur Rafale telah mencapai "tahap lanjut". Kemungkinan kontrak baru Rafale dengan Indonesia ini menjadi perhatian khusus Perancis, terutama karena Jakarta berencana untuk berinvestasi secara besar-besaran untuk memodernisasi angkatan bersenjata. Namun hal tersebut masih memerlukan proses yang panjang. Pertemuan berikutnya antara Menhan Perancis Parly dan Menhan RI Prabowo Subianto, di Paris, pada 28 Juni 2021 yaitu dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan kedua negara atau DCA, namun belum memunculkan pengumuman tentang potensi penjualan pesawat tempur Rafale tersebut. Di sisi lain, kesepakatan yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang telah dirundingkan lebih dari setahun itu ditandatangani oleh kedua menteri. "Para menteri menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang membuka jalan bagi peningkatan kerja sama di semua bidang.



Dalam konteks ini, para menteri menegaskan keinginan mereka untuk memperdalam kerja sama industri dan di bidang keamanan maritim, " kata Kementerian Angkatan Bersenjata Perancis, dalam siaran pers yang diterbitkan pada 29 Juni 2021.

Dari uraian di atas terlihat Perancis dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama dalam menjamin keamanan jalur Indo Pasifik khusus yang melintasi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Pendekatan Perancis terhadap kawasan Indo Pasifik didasarkan pada kemitraan strategis dengan negara-negara yang mempunyai persepsi yang sama terhadap kawasan. Implementasi strategi Perancis tersebut dijabarkan dalam empat bidang yaitu pertahanan dan keamanan, ekonomi, konektivitas, penelitian dan inovasi, multilateralisme dan supremasi hukum, perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Menteri Angkatan Bersenjata Perancis juga mengingatkan komitmennya untuk berkontribusi pada keamanan regional dan pemeliharaan tatanan internasional berdasarkan hukum dan multilateralisme di Indo-Pasifik. Karena itu, ketika berbicara tentang kerja sama di bidang industri pertahanan, berbicara tentang "produksi bersama" serta "penelitian dan pengembangan". DCA, lanjutnya, akan "memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia" dan mendorong "integrasinya ke dalam rantai produksi global" peralatan militer.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang Undang RI nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam Undang-Undang tersebut, Indonesia yang memberlakukan "kompensasi industri" untuk setiap pengadaan yang relevan dengan sektor pertahanan. Oleh karena itu, merupakan peluang besar bagi Perancis untuk mempersiapkan untuk penjualan pesawat tempur Rafale, atau bahkan kapal selam Scorpene, mengingat bahwa Angkatan Laut Indonesia cukup tertarik dengan Scorpene buatan Naval Group Perancis.

Penelitian ini difokuskan pada keamanan regional ASEAN sebagai bagian dari keamanan global dan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dari fokus penelitian, maka ditentukan subfokus penelitian yaitu untuk mengurangi eskalasi konflik di kawasan Indo Pasifik dengan Diplomasi Pertahanan Indonesia- Perancis.

Dari latar belakang tersebut di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut yaitu :Bagaimana kondisi lingkungan strategis kawasan Indo Pasifik dalam dalam kompetisi kekuatan aliansi AS dihadapkan dengan kekuatan China. Bagaimana kondisi lingkungan strategis regional ASEAN dalam menghadapi kekuatan global. Bagaimana kolaborasi Diplomasi Pertahanan Perancis-Indonesia dalam mengurangi tensi eskalasi konflik di kawasan Indo Pasifik

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kolaborasi Diplomasi Pertahanan

Pengertian diplomasi menurut Prof. P.M. Drost dalam buku Badri (2008:95) *"Diplomacy is an art only, while politics is art and law"* (Diplomasi hanyalah suatu seni, sedangkan politik adalah seni dan hukum). Pengertian diplomasi menurut Oxford English Dictionary adalah *"Diplomacy is the management of international relations by negotiation, the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys, the business or art of the diplomat"*. Dalam pengertian ini, diplomasi adalah seni dalam mengelola hubungan internasional dan salah satu caranya melalui negosiasi.¹ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan yang mendefinisikan diplomasi secara lebih luas: *"Diplomasi merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional"* (Martin Griffiths and Terry O'Callaghan : *International Relations : The Key Concepts*, 2002, hal. 79). Dengan melihat definisi di atas, maka diplomasi dapat juga diartikan secara lebih luas yaitu proses diplomasi yang dilakukan sebuah negara tidak hanya melalui sebuah proses negosiasi melainkan keseluruhan tindak tanduk negara dalam melakukan interaksi internasional merupakan sebuah diplomasi. Jika melihat definisi yang disampaikan Martin Griffiths tersebut, maka semakin jelas terlihat bahwa segala tindakan negara dalam hubungan internasional dapat digolongkan sebagai sebuah diplomasi termasuk pengerahan militer dengan berbagai tujuan, seperti operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

¹ Simamora, Parulian, Tantangan Diplomasi Pertahanan, Graha Ilmu.

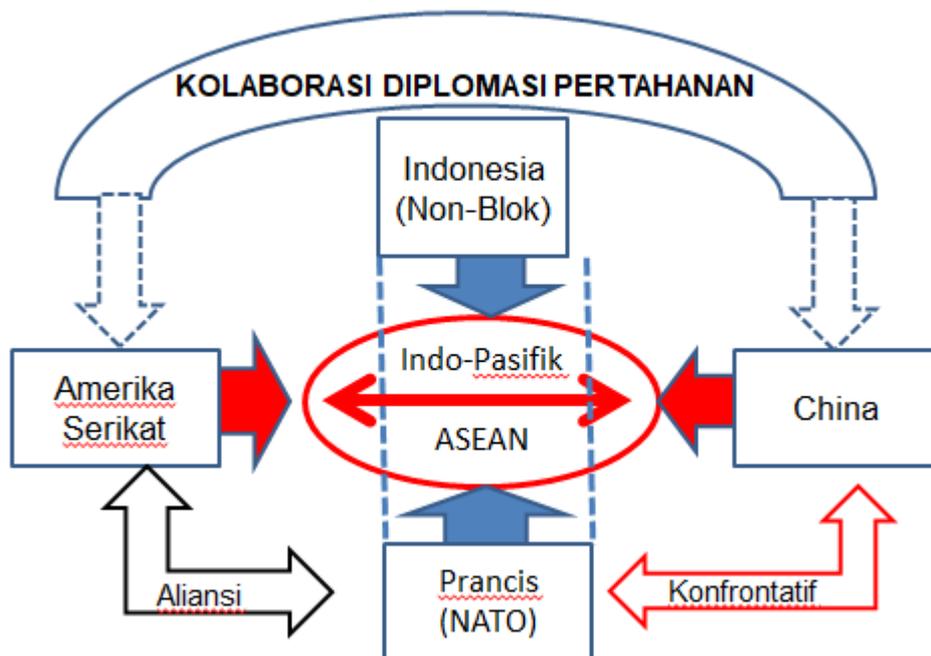


Prof. Hans J. Morgenthau dalam bukunya "The National Interest in The International Relation Theory" menjelaskan bahwa strategi diplomasi berdasarkan kepada kepentingan nasional, yang digunakan untuk kekuatan yang bisa digunakan dalam membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan Luar Negeri dilakukan untuk dapat melaksanakan Politik Luar Negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Dalam pengertian politik internasional, diplomasi pertahanan adalah untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri melalui penggunaan secara damai dari kemampuan dan sumber daya pertahanan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa diplomasi pertahanan adalah suatu seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya pertahanan.²

Dalam penelitian ini ditambahkan istilah kolaborasi. Kolaborasi berasal dari bahasa Inggris "collaboration", berarti kerjasama, atau dalam istilah lain koperasi atau "cooperation". Dengan demikian kolaborasi diplomasi pertahanan dalam penelitian ini diartikan kerjasama antara dua negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri masing-masing pihak dengan jalan damai.

² Ibid (Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan)



Gambar 2.1. Kerangka Teoritis Kolaborasi Diplomasi Pertahanan Indonesia Perancis

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dipercaya berasal dari perkara sosial dan kemanusiaan. (Cresswell, 2013, p. 44). Untuk mempelajari makna ini, peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif yang muncul untuk penyelidikan, pengumpulan data dalam pengaturan alami yang sensitif terhadap orang dan tempat yang diteliti, dan analisis data yang induktif dan deduktif dan menetapkan pola atau tema.

Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Menurut Creswell adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dipakai untuk memahami suatu informasi atau konflik menggunakan suatu masalah atau kasus dari waktu ke waktu, melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell & Poth, 2018, p. 153).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Regional.

Perubahan kawasan di Indo-Pasifik dan sekitarnya, khususnya negara-negara Pasifik dan Australia, terkait erat dengan perkembangan lingkungan strategis kawasan. Pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS oleh Australia, Inggris, dan AS pada tahun 2021 merupakan salah satu peristiwa regional yang patut diperhatikan. Kemampuan pertahanan yang lebih besar akan dikembangkan melalui kerja sama ini, khususnya dalam membantu Australia memproduksi kapal selam bertenaga nuklir. Pembentukan AUKUS berdampak pada hubungan bilateral Australia dengan Prancis, yaitu keputusan Australia membatalkan perjanjian 2016 tentang pembelian armada kapal selam Scorpene dari Prancis oleh Naval Group. miliar dolar, atau Rp 570 triliun, juga menunjukkan bahwa, dengan terbentuknya aliansi AUKUS, Australia secara sepihak meninggalkan Prancis. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim bahwa Australia telah "menikam Prancis dari belakang" dengan melakukannya. Banyak komentator percaya bahwa pendekatan tiga negara untuk menahan ekspansi China, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, adalah pembangunan aliansi AUKUS trilateral.

Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan lalu lintas di wilayah sekitar Laut China Selatan dan kerjasama antara China dan Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan di wilayah Indo-Pasifik. Indonesia menempatkan penekanan kuat pada pencegahan proliferasi nuklir di kawasan Indo-Tenggara, peningkatan bahwa Australia akan menggunakan tenaga nuklir untuk membangun kapal selam. Mengingat hal ini, beberapa negara ASEAN telah menegaskan kembali bahwa organisasi tersebut adalah kawasan yang dinamis dan inklusif yang mempromosikan perilaku etis. Australia telah menyatakan bahwa meskipun kapal selam akan ditenagai oleh energi nuklir, mereka tidak akan ditenagai sepenuhnya oleh senjata nuklir. Sebaliknya, China dengan tegas menentang perjanjian AUKUS trilateral dan memperingatkan peningkatan lomba senjata yang akan terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Akibat keluhan Australia tentang kapal selam dan AUKUS, Prancis akan mencari cara untuk memperluas kerja sama bilateral dengan negara lain di kawasan



Indo-Pasifik. Hal ini akan berdampak pada kebijakan kerja koperasi setempat. Hal ini didasarkan pada kebutuhan Indonesia untuk bekerja sama dengan Prancis dan kemungkinan serta tantangan yang harus dihadapi.

4.2 Perkembangan Nasional.

Letak Indonesia yang sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik, yang diapit oleh dua samudra dan dua benua, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama militer antara Indonesia dan Prancis. Wilayah Indo Pasifik berbagi wilayah dengan Prancis, dan disinilah letak garis pantainya. Faktor geografis dengan demikian mendorong perluasan kerjasama militer antara kedua negara. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komposisi penduduk usia produktif yang relatif lebih besar, Indonesia memiliki kondisi demografis yang menguntungkan yang patut dimanfaatkan. Serupa dengan bagaimana ekonomi mempengaruhi demografi, salah satu aspek yang mencuat adalah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi akan mendorong kerja sama dengan negara-negara sahabat, seperti Prancis, khususnya untuk kerja sama militer.

Dari sisi Ipoleksosbudhankam, terdapat opsi yang dapat digunakan untuk mendukung upaya tersebut guna memaksimalkan kerja sama militer antara Prancis dan Indonesia. Ikatan politik kedua negara yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, niscaya akan mendorong perluasan kerja sama militer mereka. Agenda KTT G-20 di Roma, Italia, Oktober 2021 menjadi alasan pertemuan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden RI menyampaikan apresiasinya atas kerjasama pertahanan yang telah memungkinkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis untuk dapat maju. Perjanjian tersebut harus memberi ruang untuk produksi bersama serta bentuk kemitraan strategis lainnya. Akan sangat diapresiasi jika Prancis berinvestasi di bisnis alutsista Indonesia.³

³ <https://www.solopos.com/presiden-jokowi-bertemu-presiden-macron-3-hal-ini-jadi-bahasan-utama-> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 20.30 wib.

Ukraina dan Rusia berperang belum terlihat tanda akan berakhir. Ini memiliki konsekuensi untuk menempatkan hambatan dalam upaya memaksimalkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Lingkungan strategis global sedang berkembang, dan ditandai oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina serta pertempuran untuk hegemoni antara Amerika Serikat dan China. Eddy Junarsin, Ekonom Universitas Gadjah Mada, mengklaim konflik di Rusia dan Ukraina berdampak signifikan terhadap Indonesia, antara lain penurunan nilai rupiah, penurunan pasar modal, hilangnya pendapatan negara akibat penurunan ekspor, peningkatan beban APBN akibat kenaikan subsidi BBM, dan kenaikan harga komoditas gandum. Kemampuan ekonomi negara untuk mendanai upaya memperkuat kerja sama militer dapat dipengaruhi oleh lima efek ini. Ketersediaan anggaran sangat penting untuk mendukung rencana operasi kerjasama militer. Kemampuan negara untuk mendanai anggaran kerjasama militer antara Prancis dan Indonesia akan terpengaruh jika situasi global memberikan pengaruh negatif yang meluas terhadap ekonomi internasional.

Persaingan di kawasan Indo-Pasifik dan klaim China atas Nine-Dash Line di Laut China Selatan. Ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dapat meningkat karena klaim China atas wilayah Sembilan Garis Putus-putus di Laut China Selatan semakin dalam. Negara-negara lain di kawasan itu mungkin akan kesulitan untuk masuk akibat eskalasi ini jika mengakibatkan konflik terbuka. Jika krisis semakin parah, kerja sama pertahanan Indonesia dan Prancis berpotensi terbatas.

4.3 Kompetisi Aliansi Amerika Serikat Vs China.

Indo-Pasifik membentang dari pantai barat Amerika Serikat hingga India dan merupakan arena utama persaingan AS-China. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan penting di Indo-Pasifik yang paling penting untuk persaingan AS-China. Asia Tenggara berbatasan dengan China dan menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan, dan Laut China Timur. Wilayah ini terpadat ketiga di dunia (setelah Asia Selatan dan Asia



Timur), dan ekonomi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dapat menempati peringkat kelima terbesar di dunia jika digabungkan.

Keanekaragaman politik, ekonomi, budaya, dan sosial Asia Tenggara, yang mencakup campuran demokrasi dan sistem politik lainnya, menantang Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitra meskipun terdapat potensi perbedaan. Mengingat pentingnya Indo-Pasifik dan Asia Tenggara, studi ini mendefinisikan dan menerapkan kerangka komparatif untuk mengevaluasi persaingan AS-China untuk mendapatkan pengaruh di sembilan negara dari seluruh kawasan. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam adalah enam negara Asia Tenggara yang dianalisis. Selain itu, dapat dianalisa tiga sekutu dan mitra penting AS lainnya yaitu Australia, Jepang, dan India yang aktif di Asia Tenggara dan secara geografis berbatasan dengan kawasan di barat, timur, dan selatan.

Beberapa resep kebijakan diberikan, termasuk penerapan kebijakan yang dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di Amerika Serikat; pengaturan perdagangan baru di Indo Pasifik yang mengecualikan China; rezim kontrol teknologi yang lebih ketat yang mempengaruhi ekspor ke China; kehadiran udara dan angkatan laut AS yang lebih besar, lebih mampu, dan lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik; dan hubungan strategis AS yang lebih dekat dengan Jepang, Australia, Republik Korea, India, dan negara-negara di Indo Tenggara. Menariknya, laporan tersebut juga mendukung intensifikasi kontak diplomatik AS-Tiongkok, merekomendasikan wacana "yang lebih jujur, tingkat tinggi, dan pribadi daripada praktik saat ini".

Pembicaraan semacam itu tidak akan pada sifat politik internal China, melainkan pada isu-isu seperti keamanan Indo Pasifik, dan kemungkinan akan melibatkan orang luar yang berpengalaman di kedua sisi yang tidak terlalu dibatasi oleh kekakuan birokrasi dan pemikiran konvensional yang biasanya menjadi ciri khas birokrasi. Akan tetapi, jelas bahwa seruan untuk dialog sejati ini tidak dimotivasi oleh optimisme mengenai hasil potensialnya. Faktanya, penulis menyimpulkan bahwa "yang paling dapat diharapkan adalah kehati-hatian dan prediktabilitas yang terkendali oleh kedua belah pihak karena persaingan

strategis AS-China yang intens menjadi normal baru, dan bahkan itu akan sulit dicapai di masa mendatang."

Peneliti mengantisipasi bahwa analisis dan rekomendasi mereka akan menjadi kontroversial dan menghasilkan kritik yang substansial, dan mereka mencurahkan kesimpulan mereka untuk mengatasi apa yang mereka anggap sebagai tantangan yang paling mungkin terjadi pada tulisan mereka. Peneliti mengantisipasi bahwa beberapa pihak akan terbujuk oleh apa yang dinyatakan di sini, sementara yang lain tetap tidak yakin bahwa apa yang diusulkan di halaman ini diinginkan atau dapat dilakukan. Strategi A.S. menghadapi China layak mendapatkan tempat yang menonjol dalam diskusi kebijakan luar negeri A.S. dan hubungan penting A.S.- China.

4.4 Komparasi Regional Asean Menghadapi Kekuatan Global

Sejak didirikannya ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) pada 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand, organisasi ini telah berperan dalam menjaga kestabilan kawasan khususnya di Asia Tenggara. Stabilitas keamanan di kawasan ini masih dapat dipertahankan berkat visi para pendiri ASEAN untuk membuat ASEAN memiliki kerjasama nonpolitik dan bertujuan menjadikan ASEAN sebagai *zone of peace, freedom and neutrality* atau kawasan yang damai, bebas dan netral. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN telah berkembang menjadi sepuluh negara dan memiliki mitra dialog yang luas, mulai dari Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang dan Uni Eropa. Meskipun ASEAN banyak mendapat kritik sebagai aliansi yang berbeda dari organisasi internasional pada umumnya, karena ASEAN tidak memiliki instrumen intervensi dan vonis terhadap negara anggotanya, namun keberadaan ASEAN terbukti berkontribusi penting dalam menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi ekosistem perdamaian yang kondusif dan tetap stabil. Dalam menghadapi kekuatan global, utamanya dengan munculnya ketegangan di kawasan Indo Pasifik akibat perebutan pengaruh antara negara adidaya terutama Amerika Serikat dan China, namun juga menyeret kekuatan lainnya seperti Inggris, Australia dan India di kawasan ini. ASEAN telah melahirkan konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)

pada tahun 2019. Elemen penting dalam AOIP adalah bahwa ASEAN melihat kawasan Indo Pasifik bukan sebagai ruang teritorial yang berdekatan, melainkan sebagai kawasan terintegrasi dan saling berhubungan erat. ASEAN juga mengedepankan dialog dan kerja sama bukan persaingan, serta mengedepankan pembangunan dan kemakmuran untuk semua. AOIP juga memandang penting domain dan perspektif maritim dalam arsitektur regional yang berkembang.

Konsep AOIP ini memberikan peluang bagi ASEAN untuk memegang peran utama sebagai pemain sentral dalam memelihara hubungan dan kerja sama kawasan Indo Pasifik, serta mendorong terus diciptakannya kesepahaman dan dialog terbuka. Indonesia menjadi pemain terpenting di ASEAN dilihat dari sejarah, perkembangan ekonomi maupun kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya visi Poros Maritim Dunia dalam konteks Indo-Pasifik, sangat berperan dalam membuka peluang Indonesia berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan di kawasan, sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri dan kebijakan yang berdampak pada taktik pendukung kepentingan nasional akan menjadi pedoman diplomasi bilateral. Indonesia dan Prancis telah menjalin hubungan diplomatik selama lebih dari 70 tahun, dan selama itu telah menjalin kerja sama di berbagai bidang. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota G-7, anggota G-20, pemimpin Uni Eropa, dan negara dengan postur angkatan bersenjata dan industri pertahanan yang maju, Prancis memainkan peran penting dan menempati posisi strategis internasional. dan kontemporer telah muncul sebagai sahabat yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya di bidang pertahanan. Angkatan Bersenjata Prancis didukung oleh anggaran pertahanan yang besar yang akan berjumlah 59,3 miliar dolar pada tahun 2021, menjadikan Prancis sebagai negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar keenam secara global. Sejumlah kesepakatan antara Prancis dan Indonesia telah diratifikasi oleh menteri pertahanan masing-masing.

IFDD, atau Dialog Pertahanan Prancis Indonesia, telah menjadi pertemuan pertahanan rutin tahunan sejak 2012 dan masih kuat hingga saat ini. Beberapa agenda



penting dipertimbangkan pada keterlibatan ini, termasuk penjadwalan kegiatan kerjasama tahunan. Penandatanganan Defense Cooperation Agreement (DCA), kesepakatan kerja sama pertahanan, telah ditetapkan pada tahun 2021. Berbagai bentuk agenda kegiatan, antara lain pertukaran pendidikan, kursus, dan pelatihan, serta kunjungan, juga telah dilaksanakan selain banyak perjanjian kontrak dan perjanjian. Tidak adanya perjanjian kerjasama pertahanan atau DCA dalam operasi kerjasama yang komprehensif merupakan salah satu dari beberapa isu utama yang menghambat upaya peningkatan kerjasama pertahanan antara Perancis dan Indonesia.

Dengan bantuan pertemuan Menteri Pertahanan dan sesi percakapan pertahanan berkelanjutan yang dikenal sebagai IFDD (Dialog Pertahanan Prancis Indonesia), hubungan kerja sama pertahanan antara Prancis dan Indonesia telah terjalin. Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis yang ditandatangani pada tahun 2011 oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Prancis Francois Fillon, merupakan salah satu agenda KTT yang penting bagi kerja sama pertahanan antara Prancis dan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 29 Februari 2012 di Paris telah ditandatangani Technical Arrangement Kegiatan Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Menteri Pertahanan Republik Perancis. Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Perancis. Dengan kesepakatan tersebut, diadakan pertemuan rutin tahunan antara delegasi kedua Kementerian Pertahanan untuk membahas agenda rencana kerja sama pertahanan tahunan yaitu IFDD. Sejak tahun 2012 IFDD telah diselenggarakan sebanyak 8 kali, hingga tahun 2021 yang sempat tertunda di tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2017 di Paris telah disepakati Statement of Intent antara Menteri Pertahanan Republik Perancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu tentang Peningkatan Kerja Sama Pertahanan, yaitu kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dengan memperluas kerangka dan ruang lingkup Dialog. Defence of Indonesia France (IFDD) dalam semangat saling menguntungkan dan kemitraan serta memperluas cakupan kerjasama dari Technical Arrangements yang telah ditandatangani sebelumnya.



Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. H. Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement di Paris. Dokumen tersebut menyepakati rencana kerja sama di berbagai bidang, antara lain intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan, kerjasama pasukan penjaga perdamaian, pemberantasan terorisme serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama pertahanan. peralatan. Awal tahun 2022, tepatnya pada 10 Februari 2022, kontrak pembelian pesawat tempur Rafale resmi ditandatangani di Kementerian Pertahanan RI saat Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Nilai kontrak pembelian enam pesawat beserta sistem pendukungnya adalah US\$1,1 miliar (Rp 116 triliun). Dalam jangka panjang, Kementerian Pertahanan RI menargetkan pembelian 36 pesawat tempur Rafale lagi yang akan memperkuat alutsista TNI AU.

Berbagai macam kegiatan kini diwadahi guna memperkuat kerja sama militer antara Prancis dan Indonesia. Namun, untuk mendorong diplomasi pertahanan sebaik-baiknya, kerjasama militer ini belum terbentuk dalam bentuk kegiatan nyata, menurut temuan penelitian dan pengamatan penulis selama penugasan. Hal ini terlihat dari minimnya kerjasama operasi yang melibatkan tentara dan perangkat keras militer. Menurut riset yang dilakukan Puskersin TNI, pada tahun 2021 hanya akan ada 7 kegiatan kerja sama militer dengan Prancis, terhitung 1,24% dari seluruh kegiatan kerja sama militer.⁴

4.5 Kolaborasi Diplomasi Pertahanan Indonesia-Prancis

Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo selain dekat dengan Amerika Serikat juga dekat dengan China. Beberapa kali pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping menunjukkan keakraban dua Negara tersebut. Hal ini menjadi modal dalam membangun diplomasi pertahanan. Pada sisi lain Prancis bagian dari aliansi sekutu Amerika Serikat, namun bukan menjadi bagian AUKUS secara langsung.

⁴ Analisa Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI TA 2021



Dalam konteks ini, multilateralisme “dalam warna China” adalah instrumen yang berfungsi baik untuk memperkuat posisinya di kancah internasional, dengan merebut topik utama seperti iklim, yang begitu banyak peluang untuk melanjutkan dialog kapan China menganggap perlu, baik membangun koalisi mendorong negara-negara berkembang untuk berbagi penolakannya terhadap sistem liberal internasional. Hal ini mengilustrasikan instrumentalisasi multilateralisme dan isu-isu utama seperti pemanasan global. China menandatangani deklarasi iklim dengan Amerika Serikat, sehingga menandakan dimulainya normalisasi dengan Washington setelah secara signifikan meningkatkan pertarungan ketegangan di Indo Pasifik. Contoh lain : China telah menolak untuk terlibat dengan India dalam masalah larangan batubara sebagai cara menampilkan poin yang sama dengan meskipun ada ketegangan. Oleh karena itu untuk alasan struktural yang berhubungan dengan sifat sistem politiknya. centang dan prioritas rezim yang tidak dapat dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok Uni Eropa dan Perancis, pilar pembangunan multilateralisme di Asia. Kelemahan ekonomi pilar Australia Sebaliknya, dalam kasus Australia, ketidakmungkinan itu bersifat tidak langsung. Di ruang Indo-Pasifik di mana praktik atau sistem politik kurang lebih jauh dari itu negara-negara demokrasi Barat yang besar tidak selalu setuju dengan wacana tentang komunitas nilai, Australia adalah pilar kerjasama dan kemitraan itu tidak dapat ditinggalkan. Keanean pemungutan suara demokratis bisa – seperti di Inggris Raya– membawa kembali kekuatan kepribadian yang lebih terbuka daripada saat ini. Namun, jika dialog strategis terjalin dengan Australia selama lebih dari sepuluh tahun dapat dikesampingkan, setelah AUKUS dan pilihan penarikan ke Anglosfer paling banyak istilah (tanpa Selandia Baru atau Kanada), sulit untuk membayangkan Australia sebagai mitra aktif Uni Eropa dalam jangka pendek, bahkan jika beberapa mantan mengutamakan keinginan. Demikian dalam siaran pers bersama yang diterbitkan pada kesempatan penandatanganan tersebut perjanjian akses timbal balik antara Jepang dan Australia, peran positif dari Euro- Uni Eropa dan Negara Anggota untuk stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan Indo Pasifik tidak disebutkan. Perubahan pemerintahan di Australia setelah pemilu yang berlangsung pada Juni 2022, jika tidak



menggugat AUKUS, akan memungkinkan tidak diragukan lagi pemulihan hubungan dengan Perancis dan Uni Eropa. Oleh mereka, dimensi regional Pasifik, di mana kerja sama antara Perancis, Australia, dan Selandia Baru memainkan peran keamanan penting dengan tunduk pada Negara-negara Pasifik beberapa ancaman, termasuk yang terkait dengan pemanasan global, penangkapan ikan ilegal, dan tekanan China, seperti contoh baru-baru ini dari Kepulauan Solomon menunjukkan, tetap hadir dan berfungsi sebagai dasar untuk kemitraan masa depan yang diperbarui.

Atase Pertahanan RI di Paris, Mabes TNI (dalam hal ini Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI), dan seluruh personel TNI yang mengikuti kegiatan atau mengenyam pendidikan di Perancis melaksanakan diplomasi pertahanan. Diharapkan diplomasi pertahanan yang sedang dilaksanakan, yang berfokus pada perluasan kerjasama militer antara Perancis dan Indonesia, dapat berjalan dengan baik dalam membantu penyelesaian tujuan utama TNI. Hal ini sesuai dengan filosofi diplomasi Adam Watson (1982:33), yang berpandangan bahwa "diplomasi adalah negosiasi antara instrumen politik, yang keduanya independen dalam mengejar tujuannya masing-masing. Kebijakan luar negeri, di sisi lain, adalah rencana atau strategi yang dibuat oleh pengambil keputusan untuk berinteraksi dengan negara lain Definisi yang diberikan oleh Sir Ernest Satow adalah "penerapan kebijaksanaan dan kecerdasan untuk melakukan hubungan luar negeri antara pemerintah negara merdeka." Dengan kata lain, diplomasi adalah penggerak kekuatan atau instrumen politik luar negeri suatu negara Sesuai dengan gagasan diplomasi, diplomasi defensif juga harus digunakan sebagai alat atau mesin untuk mempertahankan kepentingan nasional, dalam hal ini untuk membantu tugas utama TNI menegakkan kedaulatan negara, integritas wilayah, keamanan nasional, dan stabilitas kawasan Dalam hal kerjasama militer yang meningkatkan diplomasi pertahanan, disusun berdasarkan tindakan dan kriteria sebagai berikut :

A. Program Pelatihan Bersama Prancis-Indonesia dapat diadakan pada waktu yang teratur dan terjadwal. Diplomasi pertahanan dapat dilakukan dengan mengadakan latihan militer bersama antara kedua negara. Prancis dan Indonesia dapat melakukan



latihan bersama antara angkatan bersenjata mereka atau antar angkatan mereka. Misalnya, latihan bersama sekarang dilakukan oleh Angkatan Darat Prancis, Angkatan Laut Prancis, dan Angkatan Udara Prancis. Latihan ini dilakukan masing-masing dengan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, latihan gabungan yang melibatkan banyak unit dapat dilakukan. Misalnya, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara mengikuti latihan bersama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara Prancis. Kegiatan latihan gabungan ini akan meningkatkan langkah-langkah membangun kepercayaan dan kepercayaan sambil memperkuat kolaborasi militer dan komunikasi antara kedua negara. Dalam rangka membantu pembentukan postur tubuh TNI yang lebih profesional dan mencapai tujuan utamanya melalui kegiatan Latihan Gabungan, personel TNI berkesempatan untuk berinteraksi dengan pasukan militer Prancis pada saat Latihan Gabungan.

B. Kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia TNI. Hasil dari kerjasama di bidang pendidikan dan latihan tersebut, SDM TNI akan lebih berkualitas dan mampu, baik dari segi kemampuan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi maupun menjadi prajurit yang lebih profesional. Di tingkat Suslapa/Sekkau, tingkat Sesko Angkatan, tingkat Sesko TNI, dan tingkat Lemhanas, pendidikan pembangunan umum ditawarkan. Selain itu, dapat ditingkatkan secara substansial baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan program lainnya, terutama dalam hal pengetahuan teknologi dan ilmiah. Prancis berada di peringkat ke-10 secara keseluruhan dan di antara negara paling inovatif di dunia, menurut evaluasi Bloomberg. Selain itu, Prancis membanggakan berbagai industri militer yang termasuk yang terbaik di dunia dan berkembang pesat, khususnya bisnis seperti Thales, Safran, Naval Group, dan Dassault Aviation. Jika memungkinkan, perlu diupayakan kerjasama dengan Prancis di bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM TNI, khususnya yang berkaitan dengan alih teknologi, capacity



building, dan skill, khususnya dalam maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta sebagai penelitian dan pengembangan.

C. Perwakilan militer dari Perancis dan Indonesia sering bertukar kunjungan. Kunjungan delegasi petinggi militer merupakan salah satu contoh keberhasilan diplomasi pertahanan dalam aksi. Dalam kunjungan tersebut akan diadakan kegiatan berbasis percakapan dalam upaya mempererat hubungan silaturahmi dan menumbuhkan kepercayaan. Dalam situasi demikian, kunjungan delegasi militer dapat dilakukan dan diresmikan sampai dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mulai dari tingkat Panglima TNI yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Tinggi. Pelaksanaan High Level Meeting meningkatkan diplomasi pertahanan. Pertemuan para panglima militer Indonesia dan Perancis tersebut akan berdampak signifikan terhadap partisipasi TNI dalam menjalankan kewajiban fundamentalnya serta dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

D. Melalui kombinasi produksi dan inovasi, kerjasama Indonesia dan Perancis di bidang industri pertahanan dapat membantu alutsista TNI mencapai kesiapan operasional. Mendorong kerja sama antara Indonesia dan Perancis di bidang industri pertahanan yang meliputi pembelian, penyediaan suku cadang, pemeliharaan, perbaikan baik medium maupun heavy duty, serta R&D, dapat menjadi fokus diplomasi pertahanan yang kuat. Perancis memiliki beragam bisnis manufaktur dan pertahanan berkat teknologi mutakhir dan inovasi terus-menerus. Dengan memanfaatkan pengalaman Perancis di bidang teknologi dan inovasi industri pertahanan, Kemhan RI dan TNI dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Alhasil, kesiapan alutsista TNI untuk operasi fundamental dapat didukung penuh.



E. Atase pertahanan RI di Paris menjadi juru bicara terbaik TNI dalam menjalankan diplomasi pertahanan. Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidak dapat dipisahkan dari peran Atase Pertahanan sebagai wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksanaan Intelijen Strategis dari Bais TNI di negara-negara akreditasi. . Menurut Kebijakan dan Tata Tertib Kantor Atase Pertahanan dan Penasihat Militer, tanggung jawab Perwakilan RI dan Atase Pertahanan/Penasihat Militer organisasi Bais TNI antara lain membina, memelihara, dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang militer dan pertahanan negara dengan negara terakreditasi. sebagai bagian dari Perwakilan RI yang ditugaskan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok Perwakilan RI di negara akreditasi residen, non residen, dan mitra, serta menyiapkan produk intelijen untuk mendukung TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Alhasil, Athan RI di Prancis memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama militer yang lebih kuat dan melaksanakan diplomasi pertahanan. Kondisi ideal bagi Athan RI di Paris sebagai salah satu pelaksana diplomasi pertahanan adalah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik berupa personel maupun staf, baik dari segi jumlah maupun kemampuan untuk memenuhi standar yang diperlukan. Selain sumber daya manusia, kantor Atase Pertahanan RI diharapkan memiliki fasilitas yang akan memudahkan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam diplomasi pertahanan.

Salah satu inisiatif untuk mewujudkan postur SDM TNI yang profesional dan mendukung kesiapan alutsista kekinian yang dibutuhkan TNI dalam menjalankan tugasnya adalah dengan melakukan kerjasama militer dengan negara sahabat yang dapat meningkatkan diplomasi pertahanan. Perancis, salah satu negara yang berperan penting dan memegang posisi strategis di dunia internasional sebagai pemimpin Uni Eropa, anggota G-7, G-20, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah memantapkan diri sebagai mitra strategis bagi Indonesia, khususnya di bidang pertahanan. Sebuah perjanjian kerjasama pertahanan, juga dikenal sebagai DCA (Defence Cooperation Agreement), telah menetapkan

kemitraan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya untuk mengoptimalkan kerja sama militer antara Indonesia dan Prancis agar mampu meningkatkan diplomasi pertahanan dan mendukung pencapaian tugas pokok TNI. Kerja sama militer Indonesia-Prancis patut untuk diprioritaskan dalam program kerja sama internasional TNI.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kompetisi kekuatan aliansi Amerika Serikat dihadapkan dengan kekuatan China membuat kondisi lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik dalam ketidak pastian. Perkembangan lingkungan strategis baik tingkat global, regional maupun nasional perlu peningkatan diplomasi pertahanan yang didukung oleh adanya kerja sama militer antara Indonesia dengan Perancis . Karena China pada satu sisi memperluas kawasan pertahanannya di Laut China Selatan, pada sisi lain Amerika Serikat, Inggris dan Australia sebagai sekutu paling dekat membuat kesepakatan baru bentuk AUKUS. Rencana kekuatan militer yang dibangun AUKUS menunjukkan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik semakin meningkat.

ASEAN dalam menghadapi kekuatan sekutu Amerika Serikat dan China, nyaris terpecah. Sebagian berpihak pada China dan sebagian berpihak pada Amerika Serikat. Indonesia sebagai Negara non-blok tetap menunjukkan netralitas di kawasan berdasarkan politik bebas aktif. Sekalipun demikian, Indonesia membangun hubungan baik dengan Negara manapun termasuk dengan Amerika Serikat dan China.

Kolaborasi diplomasi pertahanan Indonesia-Perancis dalam mengurangi tensi eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik Pasifik ditentukan oleh posisi strategis masing-masing negara dalam mempengaruhi hubungan antar negara di kawasan Indo-Pasifik. Perancis di dunia internasional khususnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota NATO, anggota G-7, anggota G-20 dan pemimpin Uni Eropa yang memiliki postur Angkatan Bersenjata dan industri pertahanan yang maju. Indonesia sebagai Negara Non-



Blok, anggota G-20 dan menjadi salah satu pelopor pembentukan ASEAN yang pada tahun 2023 akan memegang Presidensi ASEAN, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai negara yang berkompetisi. Adanya rencana pengadaan alutsista TNI buatan Perancis terutama pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation, pesawat angkut VIP Falcon 7X dan 8X yang juga buatan Dassault Aviation serta kapal selam Scorpene buatan Naval Group dari Perancis menunjukkan meningkatnya kolaborasi diplomasi pertahanan Perancis-Indonesia. Selain itu pemimpin kedua negara, baik Presiden maupun Menteri Pertahanannya telah menjalin komunikasi yang intens dalam mewujudkan komitmen untuk peningkatan kerja sama, berkontribusi pembangunan ekonomi dan transisi energi pada dunia, serta menguatkan kerja sama bidang pertahanan dan kedirgantaraan, menunjukkan kolaborasi diplomasi pertahanan yang semakin meningkat antara Indonesia dan Perancis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Simamora, Parulian (2013) "Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan" , Graha Ilmu, Yogyakarta
- Djelantik, Sukawarsini. (2015). "Indo Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antar Kawasan". Jakarta: Buku OBOR.
- Hikam, Muhammad AS. (2014), "Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah". Jakarta: Rumah Buku.
- Yadav, Abraham Singh (2022) "Indo-Pasifik Sebuah Konstruksi Geo Poliitik". Jakarta : Pt Elex Media Komputindo
- Ohmae, Kenichi (2002). "Hancurnya Negara Bangsa Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas". Diterjemahkan oleh Ruslan. Jakarta: PT. Gramedia.



Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012). "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia". Yogyakarta: Gava Media.

Putra, Fadillah. (2001). "Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Setiawati, Siti Muti"ah (2013). "Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Arsitektur Perubahan Tatanan Politik Internasional". Proceeding Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif, Institute of International Studies. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soekanto, Soerjono,(1986) "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press).

Wiriaatmadja, Suwardi,(1970) "Pengantar Hubungan Internasional", Bandung : Alumni

David W Ziegler,1984 ,third edition,War,Peace and International relations, Toronto: Little Brown Company.,

[Repository.uin-suska.ac.id/17266/7/7](https://repository.uin-suska.ac.id/17266/7/7). BAB II (1).pdf

Abdoellah, Dr.Drs. Awan Y., M.Si & Dr. Yudi Rusfiana, M.Si, "Teori dan Analisis Kebijakan Publik" (Bandung : Alfabeta, 2016)

Freedman. Lawrence, Strategy a History, (Oxford: Oxford University Press, 2013)

Modul dan Dokumen Resmi

Kementerian Pertahanan RI, "Buku Putih Pertahanan Indonesia",(Jakarta, 2015) h. 71

Analisa Kerja Sama Internasional di Lingkungan TNI TA 2021

French Defence Strategy in the Indo Pacific, 2018, Ministère des Armées

Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) ditandatangani tanggal 28 Juni 2021 di Paris

Peraturan Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang Undang RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertahanan RI

Keputusan Panglima TNI No Kep/441/V/2018 tentang Blue Print Diplomasi Militer tahun
2019-2024

Keputusan Kabais TNI Nomor Kep/26/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Prosedur
dan Mekanisme Kerja Kantor Atase Pertahanan dan Penasihat Militer.

Surat Kabar

Herindra, M, 2022, "Mengapa Perancis, Mengapa Rafale", Harian Kompas, 16 Februari
2022 hlm.6

Tautan Berita On Line

<https://www.kemhan.go.id/2021/06/28/menhan-prabowo-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-perancis.html> diakses pada 10 April 2022 pukul 18.30

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/10/indonesia-borong-42-jet-tempur-rafale-dan-jajaki-2-kapal-selam-scorpene-dari-perancis> diakses pada 10 April 2022, pukul 19.30

<https://pendidikan.co.id/pengertian-wawasan-nusantara/> diakses pada 16 April 2022, pukul 19.30

www.etd.library.ums.ac.id, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 April 2022, pukul 20.35

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/25/kompetensi-sosial-pengawas-sekolah-kerja-sama/>, diunduh pada tanggal 21 April 2022 pukul 18.30 WIB

Chapter One: Domain trends, The Military Balance 2022, 122:1,

<https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?> diakses pada 15 April 2022
pukul 19.00



- https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_pada_pengarahan_presiden_republik_indonesia_pada_rapat_pimpinan_rapim_tni_polri_tahun_2022 diakses pada 16 Mei 2022 pukul 21.30
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6026523/harga-pangan-hingga-bbm-naik-bikin-negara-ini-ricuh-nih-buktinya> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 23.00
- <https://www.liputan6.com/global/read/3545070/komando-pasifik-as-berganti-nama-ini-alasannya> diakses pada 15 Mei 2022 pukul 20.00
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20210923/15/1445942/apa-itu-aliansi-aucus-apa-dampaknya-bagi-geopolitik-indo-pasifik> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 22.00
- <https://fokus.tempo.co/read/1508814/pakta-aucus-membuat-uni-eropa-meradang-australia-diminta-jelaskan-tindakannya/full&view> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 22.30
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses tanggal 14 Mei 2022 pukul 23.00
- <https://www.solopos.com/presiden-jokowi-bertemu-presiden-macron-3-hal-ini-jadi-bahasan-utama-1184704> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 20.30 wib.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/03/103000365/5-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-apa-saja?> diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 19.00
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/31/103300365/mui-serukan-umat-islam-indonesia-boikot-produk-perancis?page=all> diakses pada 14 Mei 2022 pukul 23.00
- <https://www.theceomagazine.com/business/innovation-technology/most-innovative-countries-2020/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00
- <https://people.defensenews.com/top-100/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.30
- <https://kbbi.web.id/komprehensif> diakses pada 30 Mei 2022 pukul 21.00

